
PERUBAHAN LANSKAP DI KOTA BANJARBARU DARI 1999 SAMPAI 2011

LANDSCAPE CHANGES IN BANJARBARU CITY FROM 1999 TO 2011

Ahmad Sholehuddin Suryanullah

Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Jln. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
ahmadsholehuddinsuryanullah@mail.ugm.ac.id

Diterima tanggal 31 Desember 2023

Disetujui tanggal 2 Desember 2024

ABSTRACT

This article discusses the process of landscape change and its impact in Banjarbaru City from 1999 to 2011. Since officially becoming a municipality in 1999, the Banjarbaru City Government has enacted a range of urban planning policies that have successfully attracted investment in the industrial and housing sectors. This influences the growth of the population and the landscape condition of Banjarbaru City. This article applied historical methods using sources such as newspapers, maps, reports from the Central Statistics Agency (BPS), and government policy letters. This research indicates that Regional Regulation Number 05 of 2001, which focuses on urban spatial planning, garnered positive interest from investors in the industrial and housing sectors during 2003 and 2004. In addition, Rudy Ariffin's plan to relocate the capital of South Kalimantan Province was included in the 2006-2010 Regional Medium Term Development Plan (RPJMD). These initiatives resulted in significant changes to the landscape, transforming green spaces into residential and industrial areas. Local communities and mining companies further intensified these alterations through traditional and modern diamond mining activities. The ongoing process of landscape transformation paralleled a population increase from 2008 to 2011, with green land transformed into urbanised areas from 2005-2011. This article seeks to bridge a gap in environmental historiography in Indonesia by examining the phenomenon of landscape change as a significant event in environmental history.

Keywords: *landscape changes, Banjarbaru City, and environmental historiography.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas proses perubahan lanskap dan dampaknya di Kota Banjarbaru dari tahun 1999 hingga 2011. Setelah resmi menjadi kotamadya baru di tahun 1999, Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan beberapa perencanaan dan kebijakan tata kota yang berhasil menarik minat investasi di bidang industri dan perumahan. Hal itu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk dan perubahan kondisi lanskap Kota Banjarbaru. Artikel ini

menggunakan metode sejarah dengan memakai sumber berupa surat kabar, peta, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010 mendapatkan respons positif yang menarik minat investasi di bidang industri dan perumahan pada 2003-2004, ditambah lagi dengan adanya rencana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang dicetuskan oleh Rudy Ariffin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010. Perencanaan dan kebijakan tersebut mengakibatkan perubahan lanskap dari lahan hijau menjadi kawasan perumahan dan industri. Tidak hanya itu, masyarakat setempat dan perusahaan pertambangan ikut memperparah perubahan lanskap, yakni dengan melakukan kegiatan penambangan intan secara tradisional dan modern. Proses perubahan lanskap juga berakibat pada kenaikan jumlah penduduk sejak 2008 hingga 2011 dan mengubah lahan hijau menjadi kawasan urban dalam kurun waktu 2005-2011. Artikel ini berusaha mengisi kekosongan dalam historiografi lingkungan di Indonesia dengan menghadirkan fenomena perubahan lanskap sebagai peristiwa sejarah lingkungan.

Kata kunci: perubahan lanskap, Kota Banjarbaru, dan historiografi lingkungan.

A. PENDAHULUAN

”Mau buka toko di Banjarbaru?” merupakan kalimat pembuka yang dilontarkan oleh wartawan surat kabar *Kompas* kepada masyarakat Kota Banjarbaru. Pertanyaan ini terefleksi dari kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang mampu melihat peluang investasi properti di sepanjang Jalan A. Yani, mulai dari Banjarmasin hingga menuju pusat Kota Banjarbaru. Banyak investor yang mulai berlomba membangun kawasan pertokoan. Orang-orang pun mulai berbondong-bondong membelinya karena sepanjang Jalan A. Yani menjadi akses yang sentral bagi masyarakat (Adhisumarta dan Sriyadi 2003:32).

Kota Banjarbaru dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah kota yang berada di ketinggian rata-rata 0-500 meter dari permukaan laut, sebagian besar memiliki karakteristik tanah

gambut dan berawa-rawa. Kota Banjarbaru secara geografis berbatasan langsung dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar di sebelah utara. Adapun bagian timurnya berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar; bagian selatannya berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut; dan bagian baratnya berbatasan dengan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Berdasarkan posisi geografisnya yang hampir seluruhnya dikelilingi Kabupaten Banjar, bisa terlihat bahwa pemekaran Banjarbaru sebagai kotamadya memakan cukup banyak wilayah yang berada di Kabupaten Banjar (Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru 2024). Menurut tinjauan fisiografi, wilayah Banjarbaru masuk ke dalam sistem fisiografi Tinggian Maratus dan berada di kaki perbukitan Maratus (Mustofa 2005:74).

Konsep kota administratif mulai diperkenalkan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya tahun 1975. Selaras dengan kebijakan presiden tersebut, status Banjarbaru yang awalnya hanya berupa kecamatan, berubah menjadi kota administratif pada 1975 (Aurumbita 2015:73). Kemudian, pemerintah melakukan pembaruan undang-undang yang mengubah kota administratif menjadi kotamadya, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Undang-undang itu menyebutkan bahwa Banjarbaru memisahkan diri dengan Kabupaten Banjar dan berdiri sendiri sebagai kotamadya atau setara daerah tingkat II (Indonesia 1999:1-9).

Setelah menjadi kotamadya, upaya penataan kota dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010. Penataan ruang kota dibagi menjadi dua fungsi, yakni: (1) fungsi utama sebagai pelayanan transportasi, perdagangan dan jasa, pendidikan serta latihan, pemerintahan, pelayanan sosial dan umum, kawasan konservasi atau ruang terbuka hijau, dan (2) fungsi penunjang sebagai pelayanan fasilitas skala Bagian Wilayah Kota (BWK), kawasan perumahan, dan kawasan khusus TNI/Polri. Berdasarkan pembagian fungsi tersebut, Kecamatan Landasan Ulin memiliki fungsi utama sebagai kawasan pengembangan industri, pelayanan transportasi regional, nasional, dan

internasional, pengembangan permukiman perkotaan, pertambangan, rekreasi, dan pendidikan. Adapun fungsi penunjangnya meliputi pelayanan skala BWK, lahan cadangan, pengembangan pertanian, kawasan khusus TNI/Polri, pengembangan sarana olahraga, kawasan konservasi atau Ruang Terbuka Hijau (RTH), bandar udara, dan perumahan. Kecamatan Cempaka memiliki fungsi utama sebagai pengembangan permukiman perkotaan, pertambangan, lahan cadangan, kawasan pendidikan, dan kawasan pemerintahan. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan konservasi atau RTH, pelayanan skala BWK, perumahan, pertanian dan perkebunan, kawasan khusus TNI/Polri, dan kawasan wisata (Banjarbaru 2001:5-10).

Setelah penetapan perda tata ruang Kota Banjarbaru pada 2001, enam tahun berikutnya terbit Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru. Kecamatan yang mengalami pemecahan ialah Kecamatan Banjarbaru yang dipecah menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Selain itu, Kecamatan Landasan Ulin dipecah menjadi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang. Tujuan dari pemecahan kecamatan ini untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa setiap pemekaran wilayah akan membutuhkan lahan baru untuk membangun kantor pemerintahan

yang difungsikan sebagai kebutuhan administratif (Banjarbaru 2007:1-6).

Perkembangan Kota Banjarbaru tidak bisa terlepas dari gagasan Dokter Murjani yang mempunyai keinginan memindahkan ibu kota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru di tahun 1950-an karena wilayah ini dianggap strategis. Keinginan itu benar-benar terwujud pada 2022 (Pujianti 2022a). Pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru masuk ke dalam agenda pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota Banjarbaru digunakan sebagai wilayah penyangga IKN (Pujianti 2022b). Pemilihan Kota Banjarbaru sebagai wilayah penyangga menjadi pendorong kemajuan karena adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat.

Namun, upaya untuk memajukan kota memiliki beberapa dampak negatif, terutama pada sektor kehutanan. Pembangunan gedung-gedung dan pembukaan lahan perkebunan atau pertanian di Kota Banjarbaru memakan sebagian hutan negara, padahal masalah deforestasi yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan belum selesai. Persoalan tersebut ditambah lagi dengan perubahan fungsi lahan hutan untuk membangun Kota Banjarbaru (Hidayat 2016:6).

Sayangnya, dalam narasi besar historiografi Indonesia hampir tidak pernah menyinggung perubahan lanskap Kota Banjarbaru. Meski tesis Hidayat (2009) mengulas tentang dampak dari perubahan lingkungan sungai yang berpengaruh terhadap penurunan kondisi sosial ekonomi

petani di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, tetapi narasi historis tentang perubahan lanskap tidak pernah disinggunginya. Ia hanya menyoroti dampak dari perubahan lingkungan sungai terhadap kondisi sosial ekonomi. Mahyudin et al. (2011), dalam kajiannya menunjukkan bahwa jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Banjarbaru tahun 2011 hampir tidak sepadan dengan sampah yang dihasilkan dari penduduk Kota Banjarbaru. Padahal, jika ditarik dari latar historis mengenai perubahan lanskap, penulis bisa merunut sebab-akibat dari peningkatan jumlah sampah di Kota Banjarbaru. Akan tetapi, penulis belum melakukannya dan tidak memaknainya sebagai fenomena perubahan lanskap.

Sama halnya dengan Setyati (2012), dalam tesisnya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru*, ia menjelaskan mengenai peraturan batas minimal RTH di Kota Banjarbaru, yakni 30 persen dari keseluruhan wilayah. Tetapi faktanya, pada 2011, jumlah RTH hanya seluas 612,10 hektare atau setara dengan 1,65 persen dari keseluruhan kota. Meski sudah berusaha menguraikan penerapan tata ruang di Kota Banjarbaru, tetapi Setyati hanya terpaku pada data di tahun 2011. Padahal, melihat secara historis penataan ruang Kota Banjarbaru di periode-periode sebelumnya juga penting sehingga mampu melihat proses perubahan lanskap secara utuh.

Karena terbatasnya narasi tentang perubahan lanskap di Kota Banjarbaru dalam historiografi Indonesia, maka

dari itu, dirasa perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai sejarah perubahan lanskap di Kota Banjarbaru. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan terhadap tulisan terdahulu yang telah dipaparkan di atas, permasalahan utama yang akan diulas pada artikel ini, yakni berubahnya lanskap Kota Banjarbaru akibat dari beberapa kebijakan dan perilaku manusia. Permasalahan tersebut dijabarkan melalui beberapa pertanyaan penelitian, yakni bagaimana proses perubahan lanskap dari tahun 1999 hingga 2011? Seperti apa dampak yang diakibatkan oleh perubahan lanskap?

Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi batas spasial pada penelitian ini, sedangkan rentang waktu 1999-2011 dipilih sebagai batas temporalnya. Alasan pemilihan tahun 1999 menjadi batas awal penelitian karena mengacu pada penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru yang mengubah status kota administratif menjadi kotamadya (Indonesia 1999:10). Kemudian, dipilihnya tahun 2011 sebagai batas akhir penelitian karena pada 9 Agustus 2011 terjadi pemindahan sebagian aktivitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru (Pujianti 2022a).

Konsep yang digunakan dalam membangun narasi pada tulisan ini ialah konsep perubahan ekologi. Hughes (2009) mengemukakan bahwa hubungan atau relasi antara manusia dengan lingkungannya yang dilakukan secara berkelanjutan akan memberi perubahan. Sama halnya ketika

berbicara tentang lanskap Kota Banjarbaru, jika relasi antara manusia dengan lingkungan Kota Banjarbaru dilakukan secara terus-menerus, maka perubahan lanskap tidak bisa dihindari.

Politik lingkungan dirasa perlu sebagai pelengkap konsep. Dalam hal ini, McNeill (2003) memosisikan suatu negara sebagai sentral dalam pengelolaan lingkungan, entah yang bersifat konservasi atau eksploitatif. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemikian Nawiyanto (2012) bahwa kondisi lingkungan sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah mampu mengubah lanskap di suatu daerah. Kondisi ini terlihat dengan adanya beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kota Banjarbaru untuk menata ruang kota.

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka konseptual yang sudah dipaparkan, artikel ini bertujuan untuk menelusuri, menggali fakta, memaparkan penyebab dari perubahan lanskap Kota Banjarbaru, serta menguraikan dampak apa saja yang diakibatkan oleh perubahan lanskap. Secara historiografis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada historiografi Kota Banjarbaru dan historiografi lingkungan di Indonesia.

B. METODE

Studi ini dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode tersebut memiliki beberapa tahapan, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik

sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 2013:69). Pada tahap pertama, yaitu pemilihan topik, penulis memilih topik proses perubahan lanskap dan dampak yang diakibatkannya di Kota Banjarbaru mulai dari tahun 1999 sampai 2011. Pengumpulan sumber yang merupakan tahap kedua dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Departemen Sejarah UGM, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Perpustakaan Fakultas Geografi UGM, dan Perpustakaan Pusat UGM. Tidak hanya itu, terdapat pula sumber lain, yaitu beberapa surat kabar sezaman, dokumen laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, dan peta yang dipublikasi oleh Google Earth Pro.

Selanjutnya, tahap ketiga ialah melakukan tahapan kritik. Pada tahapan ini, penulis melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal merupakan sebuah proses untuk mengkritisi kondisi fisik dari suatu sumber, yakni memastikan bahwa sumber atau dokumen terkait memang diterbitkan sezaman dengan tahun topik pembahasan. Kritik internal merupakan proses untuk mengkritisi isi dari sumber atau dokumen dan memastikan bahwa substansi dari sumber ini memang relevan dengan topik pembahasan.

Setelah melalui proses kritik, tahap berikutnya yaitu interpretasi. Pada tahapan ini, penulis membandingkan isi satu sumber dengan sumber lainnya agar memperoleh fakta sejarah. Babak terakhir dalam metode sejarah ialah historiografi atau bisa disebut penulisan sejarah. Tahapan ini baru bisa dilakukan setelah melewati beberapa tahap

sebelumnya supaya penulis mampu menarasikan sejarah secara objektif. Tetapi, tidak menutup kemungkinan subjektivitas dari penulis memengaruhi narasi yang dibangun karena pengalaman atau kedekatan emosional penulis terhadap topik pembahasan.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Proses Perubahan Lanskap Kota Banjarbaru tahun 1999-2011 Beserta Dampaknya

Dalam pembahasan mengenai proses perubahan lanskap Kota Banjarbaru kurun waktu 1999-2011, terdapat tiga hal yang akan ditampilkan beserta dengan dampaknya, yakni perubahan bentuk administratif kota, wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, dan kegiatan penambangan intan yang dilakukan secara tradisional dan modern.

a. Perubahan Bentuk Administratif Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru mengalami babak baru dalam tata pemerintahan setelah memisahkan diri dengan Kabupaten Banjar tahun 1999. Pemisahan ini didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Indonesia 1999:7).

Karena sudah menjadi wilayah sendiri yang setingkat dengan kabupaten, wali kota selaku kepala wilayah memiliki wewenang yang sama seperti bupati. Kesetaraan ini menjadikan wali kota dapat mengeluarkan beberapa kebijakan

penataan ruang dan perubahan fungsi lahan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan administrasi dan kegiatan ekonomi. Sebelum semua direncanakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menyelenggarakan pemilihan wali kota pertama tahun 1999 dan dimenangkan Rudy Resnawan sebagai wali kota pertama (BPS Kota Banjarbaru 2002:15).

Selepas dilantik menjadi wali kota pertama di Kota Banjarbaru, Rudy Resnawan melakukan pengkajian terkait penataan ruang di kota tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut, kemudian muncul kebijakan penataan ruang Kota Banjarbaru tahun 2001. Saat itu, Kota Banjarbaru memiliki 3 kecamatan, yakni Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Cempaka, yang ketiganya memiliki fungsi masing-masing dalam perencanaan wilayah. Kecamatan Banjarbaru digunakan sebagai kawasan pelayanan publik serta transportasi, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan wilayah konservasi atau RTH, selain itu juga digunakan sebagai wilayah penunjang untuk perumahan dan markas militer. Kecamatan Landasan Ulin difungsikan sebagai kawasan pengembangan industri, pelayanan transportasi dari regional sampai internasional, permukiman, pertambangan, pendidikan, dan kawasan rekreasi, dengan fungsi penunjang sebagai lahan cadangan, pengembangan pertanian, markas militer, sarana olahraga, fasilitas bandar udara, dan perumahan. Kecamatan Cempaka dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan

permukiman, pertambangan, lahan cadangan, pendidikan, pemerintahan. Fungsi penunjangnya sebagai wilayah konservasi atau RTH, perumahan, pertanian dan perkebunan, markas militer, serta kawasan wisata. Selain merencanakan penataan fungsi lahan di beberapa kecamatan, Wali Kota Banjarbaru juga menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarbaru 2001:13). Kemunculan peraturan daerah tersebut memengaruhi minat para investor untuk berinvestasi di Kota Banjarbaru.

Konsep politik lingkungan McNeill (2003) menyatakan bahwa peran dari suatu negara sangat memengaruhi kondisi alam beserta lingkungan karena negara mempunyai wewenang penuh dalam mengonservasi dan mengeksploitasi wilayahnya. Nawiyanto (2012) berpendapat bahwa kunci dari eksekusi kegiatan yang berlangsung di suatu negara terletak pada kebijakan pimpinan negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menata alam beserta lingkungannya diterapkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah atau pimpinan negara beserta jajarannya. Di tingkat provinsi, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalimantan Selatan berupa perubahan bentuk administratif terhadap Kota Banjarbaru berakibat pada perubahan lanskap kota. Berikut ini adalah uraian mengenai perubahan lanskap yang disebabkan oleh perubahan bentuk administratif.

Seperti yang disampaikan oleh Adhisumarta dan Sriyadi (2003) dalam surat kabar *Kompas*, dalam kurun waktu Mei 2002 hingga Juli 2003,

para pengembang mengajukan 598 Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun IMB yang diajukan dari Januari sampai Juli 2003 sebanyak 222 pengajuan. Pertumbuhan perumahan dari tahun 2000 sampai 2003 tercatat sebesar 6,1 persen, sedangkan pertumbuhan penduduk hanya 3,8 persen saja. Tingginya pertumbuhan perumahan menyebabkan perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 1.

Pekarangan atau Lahan untuk Bangunan	
Tahun	Jumlah
2001	8.005
2002	8.005
2003	8.045
2004	9.037
2005	7.857
2006	7.857
2007	7.857

Tegal atau Kebun	
Tahun	Jumlah
2001	4.596
2002	4.596
2003	3.761
2004	3.014
2005	3.014
2006	3.014
2007	3.107

Hutan Rakyat	
Tahun	Jumlah
2001	3.175
2002	3.175
2003	2.762
2004	315
2005	315
2006	315
2007	335

Total Keseluruhan	
Tahun	Jumlah
2001	15.776
2002	15.776
2003	14.568
2004	12.366
2005	11.186
2006	11.186
2007	11.299

Tabel 1. Luas tanah kering menurut penggunaannya di Kota Banjarbaru (dalam hektare) tahun 2001-2007. Sumber: diolah dari BPS Kota Banjarbaru.

Tabel 1 menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk kawasan bangunan dan pekarangan pada 2004 mengalami kenaikan hampir 1.000 hektare daripada tahun-tahun sebelumnya (BPS Kota Banjarbaru 2005), lalu mengalami penurunan lagi pada 2005, yakni hampir 2.000 hektare (BPS Kota Banjarbaru 2006). Jumlah tanah yang difungsikan sebagai tegal atau kebun mengalami penurunan terus-menerus dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Hal yang sama juga terjadi pada hutan rakyat, setiap tahunnya mengalami penurunan (BPS Kota Banjarbaru 2003), namun kemudian mengalami penurunan drastis pada 2004, yakni menurun sekitar 2.000 hektare lebih (BPS Kota Banjarbaru 2004). Meski sempat mengalami kenaikan pada 2007, tetapi jumlahnya terbilang cukup sedikit karena tidak sampai 100 hektare (BPS Kota Banjarbaru 2007). Alasan terjadinya penurunan drastis pada luas lahan yang digunakan di sektor perkebunan dan hutan rakyat adalah karena adanya peralihan fungsi lahan untuk sektor lainnya, misalnya perumahan (BPS Kota Banjarbaru 2008).

Selanjutnya, kondisi pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru disajikan pada tabel berikut.

Kecamatan Landasan Ulin	
Tahun	Jumlah
2001	12.191
2002	13.546
2003	15.228
2004	15.422
2005	16.037
2006	16.153

Kecamatan Banjarbaru	
Tahun	Jumlah
2001	13.496
2002	16.834
2003	17.855
2004	18.565
2005	19.051
2006	19.190

Kecamatan Cempaka	
Tahun	Jumlah
2001	4.761
2002	4.368
2003	5.468
2004	5.632
2005	5.807
2006	5.850

Total Keseluruhan	
Tahun	Jumlah
2001	30.421
2002	34.748
2003	38.551
2004	39.621
2005	40.895
2006	41.193

Tabel 2. Jumlah rumah tangga di Kota Banjarbaru tahun 2001-2006. Sumber: diolah dari BPS Kota Banjarbaru.

Menurut data yang dipaparkan pada tabel 2, Kecamatan Landasan Ulin mengalami lonjakan jumlah rumah tangga di tahun 2003, yakni naik hampir 2.000 rumah tangga (BPS Kota Banjarbaru 2004). Pada tahun-tahun berikutnya, kenaikan tidak terlalu

tinggi, bahkan tidak sampai 1.000 rumah tangga (BPS Kota Banjarbaru 2005). Kecamatan Banjarbaru juga mengalami hal yang sama, tetapi lonjakan jumlah rumah tangga terjadi pada 2002, yakni naik sekitar 3.000 rumah tangga (BPS Kota Banjarbaru 2003). Berikutnya, pada 2002 sampai 2004, terjadi kenaikan sekitar 1.000 rumah tangga, dan antara tahun 2005 dan 2006 naiknya tidak sampai 1.000 rumah tangga (BPS Kota Banjarbaru 2006). Jumlah rumah tangga di Kecamatan Cempaka memiliki grafik yang berbeda dari dua kecamatan sebelumnya, yang pada 2002 mengalami penurunan jumlah rumah tangga sekitar 400 keluarga. Setelah itu, baru naik lagi pada 2003 sampai seterusnya. Meskipun demikian, kenaikannya terbilang sedikit karena setelah itu tidak ada lonjakan yang mencapai 2.000 rumah tangga (BPS Kota Banjarbaru 2007). Penurunan jumlah rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Cempaka tahun 2002 kemungkinan besar karena penduduknya berpindah tempat ke Kecamatan Banjarbaru. Oleh sebab itu, Kecamatan Banjarbaru mengalami lonjakan drastis pada 2002. Dugaan ini diperkuat oleh perencanaan tata ruang Kota Banjarbaru bahwa wilayah Kecamatan Banjarbaru menjadi akses sentral bagi pembangunan wilayah kota.

Sebagai respons terhadap perubahan fungsi lahan dan jumlah penduduk dari tahun 2001-2006, Wali Kota Banjarbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru.

Kecamatan yang mengalami pemekaran ialah Kecamatan Banjarbaru menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan, sedangkan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang. Tujuan dari pemekaran spasial di Kota Banjarbaru, yakni untuk mewujudkan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, pemerataan wilayah, dan keterjangkauan pelayanan pemerintahan. Maka dari itu, Kota Banjarbaru mengalami pemekaran dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan pada 2007 (Banjarbaru 2007).

b. Wacana Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010, pemerintah setempat sudah membagi beberapa wilayah untuk perkantoran, perumahan, RTH, dan lain sebagainya. Di tahun 2005, salah satu calon gubernur Kalimantan Selatan, Rudi Ariffin, mengangkat isu pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Rudy Ariffin memasukkan rencana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai janji politik. Ia berjanji bahwa jika terpilih menjadi gubernur, maka ibu kota provinsi akan dipindahkan ke tempat yang baru.

Setelah terpilihnya Rudy Ariffin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2010, satu tahun kemudian, ia berupaya menepati janjinya untuk memindahkan ibu kota

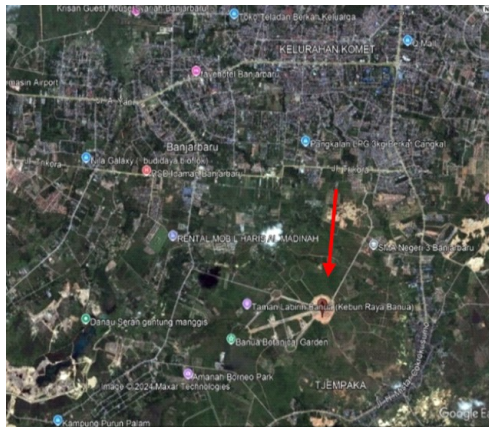
provinsi. Banjarbaru menjadi kandidat tunggal sebagai pengganti Banjarmasin. Rudy Ariffin meneruskan cita-cita yang digagas oleh Dokter Murjani di tahun 1950-an. Ternyata memindahkan ibu kota provinsi tidak segampang seperti apa yang dipikirkan. Rudy Ariffin mengalami beberapa kesulitan, terutama dalam penyediaan anggaran. Proses pemindahan ibu kota juga membutuhkan waktu lama. Setelah menimbang dan memikirkan dengan matang, solusi yang paling realistis ialah memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Banjarbaru. Untuk menunjang keberlangsungan pemindahan pusat pemerintahan tersebut, rencana ini dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2010 (Aurumbita 2015:71-75).



Gambar 1. Peta wilayah Martapura yang mencakup kota administratif Banjarbaru tahun 1991. Sumber: Koleksi KITLV Maps.

Sebelum pemindahan pusat pemerintahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, hal yang paling penting untuk dipikirkan adalah lokasi lahan baru, tempat dibangunnya gedung-gedung pemerintahan. Gambar 1 memperlihatkan bahwa pembangunan

gedung pemerintahan di pusat kota yang diberi warna oranye kurang memungkinkan karena wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Oleh karena itu, pilihan yang paling memungkinkan mencari lokasi dengan tingkat kepadatan rendah, seperti di kawasan Cempaka yang berwarna hijau. Jika melihat pengklasifikasian di peta tersebut, kawasan dengan warna hijau terdiri atas hutan-hutan asri. Pemerintah Kalimantan Selatan memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan wilayah itu terhindar dari banjir karena lokasinya tidak berada di rawa-rawa (Bakosurtanal 1991). Sebagai pembanding untuk melacak sejauh mana perubahan lanskap yang disebabkan oleh pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, penulis menyajikan peta yang lebih muda tahun pengeluarannya, seperti yang terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta wilayah Kota Banjarbaru tahun 2012. Sumber: Google Earth Pro.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Arsyadi, menyampaikan bahwa

pembangunan kantor gubernur yang berlokasi di kawasan Cempaka mulai dibangun tahun 2008. Setelah itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin, pada 2010 mengonfirmasi bahwa pembangunan sudah mencapai 90% dan tinggal tahap *finishing* saja. Pembangunan gedung yang memiliki luas sekitar 26.000 meter persegi dan berlantai empat tersebut menghabiskan dana APBD sekitar Rp182 miliar. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai tahun 2011 (Anonim 2010). Gambar 3 memperlihatkan progres pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru.



Gambar 3. Pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru dipotret dari atas. Sumber: barakata.id.

Meski pembangunan sudah ditargetkan selesai tahun 2011, akan tetapi target tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena masih banyak jalan yang belum diaspal maupun dicor, seperti tampak pada gambar 3 (Linus 2019). Selain itu, banyak tanah bekas galian yang belum dibersihkan dan masih berserakan di sekitar gedung kantor gubernur yang baru, seperti ditunjukkan oleh gambar 4 (Amberi 2012).



Gambar 4. Progres pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru pada 2012. Sumber: dokumentasi Wajidi Amberi.

Perubahan lanskap akibat pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan dapat diketahui dengan membandingkan gambar 1 dengan gambar 2. Kondisi yang paling mencolok tampak pada posisi yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Pada 1991, wilayah tersebut masih dipenuhi hutan belantara, sedangkan pada 2012 sudah beralih menjadi gedung-gedung pemerintahan (Google Earth Pro 2012c). Dengan demikian, cukup jelas perubahan lanskap yang disebabkan oleh kebijakan politik, sejalan dengan konsep yang dipaparkan oleh McNeill dan Nawiyanto bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam perubahan lanskap Kota Banjarbaru.

Gagasan pemindahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru menarik para investor di bidang infrastruktur dan menjadi pendorong bagi berkembangnya industri. Lahan yang banyak dilirik berada di sekitar Jalan A. Yani yang menghubungkan antara Banjarmasin dan Banjarbaru. Memang kalau dilihat, Jalan A. Yani menjadi akses sentral penghubung antardaerah,

seperti halnya jalan utama ketika ingin ke Kalimantan Tengah, Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar. Maka dari itu, para investor tidak ingin ketinggalan momen langka tersebut (Abdurrahman et al. 2022:145).

Wacana mengenai pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berakibat pada perubahan lahan, yakni dari lahan pertanian, hutan, dan pekarangan menjadi kawasan terbangun, seperti industri ataupun perumahan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam konsep politik lingkungan, dijelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan memberikan dampak pada perubahan lanskap suatu negara atau wilayahnya. Tabel 3 dibawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan lanskap di area spasial Kota Banjarbaru.

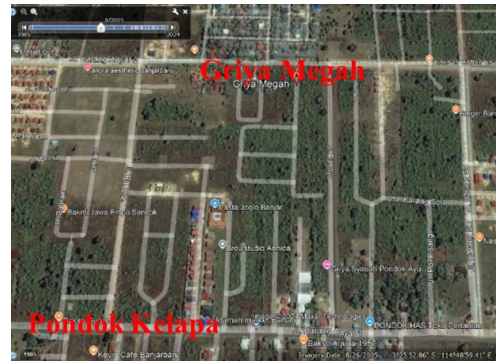
Tahun	Industri	Perumahan
2007	768	2111
2008	857	3201
2009	1008	2726
2010	1106	3812
2011	1045	2788

Tabel 3. Jumlah industri dan perumahan tahun 2007-2011. Sumber: diolah dari BPS Kota Banjarbaru tahun 2007-2011.

Berdasarkan tabel 3, perkembangan industri dan perumahan selaras dengan rencana pembangunan di Kota Banjarbaru (BPS Kota Banjarbaru 2009). Sudah terkonfirmasi bahwa pengurangan hutan rakyat dan perkebunan dalam rentang waktu 2001-2007 sebagai dampak dari meningkatnya investasi industri dan perumahan (BPS Kota Banjarbaru

2010). Menurut tabel 2, sektor industri di Kota Banjarbaru dari tahun 2007 sampai tahun 2010 mengalami kenaikan, sedangkan pada 2011 sempat mengalami penurunan (BPS Kota Banjarbaru 2011b). Pada sektor perumahan, terjadi fluktuasi di setiap tahun, yaitu pada 2008 naik, tahun 2009 turun, tahun 2010 naik, dan tahun 2011 turun lagi. Angka kenaikan yang pesat terlihat pada 2010, baik di sektor industri maupun perumahan (BPS Kota Banjarbaru 2012d). Penurunan lahan kering dari tahun 2001 hingga 2007 diduga terjadi karena pembangunan perumahan dan industri pada 2007-2010. Berdasarkan perbandingan dua data tersebut, jumlah lahan kering mengalami penurunan, sedangkan perumahan dan industri mengalami kenaikan. Terlihat jelas bahwa kebijakan dari pemerintah berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan di Kota Banjarbaru.

Jika meninjau sektor perumahan di tahun 2007-2011, angkanya cukup stabil. Oleh karena itu, hampir setiap tahun terjadi perubahan fungsi lahan untuk dijadikan perumahan. Analisis tersebut juga diperkuat oleh data yang diuraikan Setyati dan Utomo (2015) bahwa dari keseluruhan RTH Kota Banjarbaru tahun 2011, yang luasnya semula sekitar 612,10 hektare telah mengalami perubahan menjadi perumahan kurang lebih sekitar 30 persen dari keseluruhan RTH. Gambaran tentang perubahan dari RTH menjadi perumahan dapat terlihat dari perubahan kondisi Perumahan Pondok Kelapa dan Perumahan Griya Megah di tahun 2005 dan 2012.



Gambar 5. Perumahan Pondok Kelapa dan Griya Megah tahun 2005. Sumber: Google Earth Pro.



Gambar 6. Perumahan Pondok Kelapa dan Griya Megah tahun 2012. Sumber: Google Earth Pro.

Perumahan Pondok Kelapa dan Perumahan Griya Megah sama-sama dibangun oleh perusahaan pengembang PT Megah Jaya Prestasi yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru (PUPR). Gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa pembangunan kompleks perumahan oleh perusahaan dapat mengubah lanskap kota. Pada 2005 masih terlihat banyak lahan RTH (Google Earth Pro 2005a), tetapi dalam kurun waktu 7 tahun berikutnya, ketersediaan RTH sudah mulai menipis (Google Earth Pro 2012b).



Gambar 7. PT. Japfa Comfeed Indonesia
Cabang Banjarbaru tahun 2005.
Sumber: Google Earth Pro.



Gambar 8. PT. Japfa Comfeed Indonesia
Cabang Banjarbaru tahun 2011.
Sumber: Google Earth Pro.

Aktivitas PT Japfa Comfeed Indonesia dapat menjadi contoh untuk melihat sejauh mana perubahan lanskap yang disebabkan perluasan kawasan peternakan. Perusahaan Japfa Comfeed Indonesia berdiri pada 1971 sebagai produsen pelet kopra. Namun, pada 1975, perusahaan ini mulai bergerak sebagai produsen pakan ternak, kemudian berkembang lagi tahun 1982 sebagai perusahaan pembibitan ayam ternak (Febriana et al. 2015:67). Perusahaan tersebut mengalami perkembangan pesat dan membuka beberapa cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjarbaru. Meski

belum diketahui tahun berapa cabangnya di Banjarbaru dibangun, tetapi berdasarkan peta di gambar 7, PT Japfa Comfeed Indonesia Cabang Banjarbaru sudah beraktivitas sejak 2005. Berdasarkan pengamatan peta tahun 2005, perusahaan tersebut memiliki 12 bidang kandang ayam (Google Earth Pro 2005c). Selang enam tahun kemudian, yakni pada 2011, bertambah sebanyak 4 bidang kandang ayam (Google Earth Pro 2011c). Dengan demikian, lanskap yang awalnya lahan RTH berubah menjadi industri di sektor peternakan.

Munculnya industri dan perumahan di Kota Banjarbaru menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan serta memilih tinggal di daerah yang dekat dengan pusat industri. Kondisi ini memicu kenaikan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru. Tabel 4 memuat data jumlah penduduk dari tahun 2008 sampai 2011.

Kecamatan Landasan Ulin	
Tahun	Jumlah
2008	10.515
2009	10.971
2010	14.166
2011	14.613

Kecamatan Liang Anggang	
Tahun	Jumlah
2008	6.696
2009	6.987
2010	8.774
2011	9.110

Kecamatan Cempaka	
Tahun	Jumlah
2008	6.233
2009	6.503
2010	7.348
2011	7.547

Kecamatan Banjarbaru Utara	
Tahun	Jumlah
2008	9.686
2009	10.106
2010	12.759
2011	12.965

Kecamatan Banjarbaru Selatan	
Tahun	Jumlah
2008	10.759
2009	11.226
2010	12.850
2011	13.204

Total Keseluruhan	
Tahun	Jumlah
2008	43.889
2009	45.793
2010	55.897
2011	57.439

Tabel 4. Jumlah rumah tangga Kota Banjarbaru tahun 2008-2011. Sumber: diolah dari BPS Kota Banjarbaru.

Terjadinya pemekaran kecamatan di Kota Banjarbaru pada 2007, dari tiga menjadi lima kecamatan, berkaitan dengan pertambahan jumlah rumah tangga dari tahun 2001 sampai tahun 2006. Maka dari itu, pemekaran kecamatan tersebut termasuk dampak dari pertumbuhan rumah tangga. Tujuan lain dari pemekaran kecamatan, yakni untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi dan pemerataan pembangunan (Banjarbaru 2007).

Selaras dengan data pada tabel 4, kenaikan jumlah rumah tangga beriringan dengan penurunan jumlah lahan kering di Kota Banjarbaru. Hal tersebut terjadi karena jika jumlah rumah tangga meningkat, maka kebutuhan hunian juga meningkat. Akibatnya, fungsi lahan hijau berubah menjadi lahan perumahan (BPS Kota Banjarbaru 2009).

Peningkatan jumlah rumah tangga tidak hanya berhenti di tahun 2007, tetapi juga selalu mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Selama 2008-2011, tidak ada kecamatan yang mengalami penurunan jumlah rumah tangga. Rata-rata kenaikan jumlah rumah tangga di Kota Banjarbaru berada di atas 1500-an jiwa (BPS Kota Banjarbaru 2012d).

c. Kegiatan Penambangan Tradisional dan Modern

Bukan hanya kebijakan pemerintah saja yang memengaruhi perubahan lanskap, melainkan perilaku masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap perubahan lanskap Kota Banjarbaru. Hughes (2009) mengungkapkan tentang perubahan ekologi dengan menjelaskan bahwa relasi manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya mampu mengubah kondisi lanskap lingkungannya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cempaka, mereka melakukan kegiatan penambangan intan secara tradisional atau biasa disebut mendulang. Kegiatan mendulang sudah dilakukan sejak lama, sebelum periode kolonial (Azkia 2018:61).

Penambangan intan rakyat yang berada di Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka sudah beroperasi sejak tahun 1990-an dan masih terus berlanjut sampai tahun 2009. Lokasi tersebut berdekatan dengan Desa Sungai Tiung. Mereka melakukan penambangan intan dengan menggunakan alat sedot. Menurut data Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, luas pertambangan rakyat kurang lebih 277 hektare, didukung 198 unit alat sedot dan

melibatkan 792 personel penambang aktif (Hidayat 2009:76).



Gambar 9. Kegiatan mendulang intan tempo dulu. Sumber: *Radar Banjarmasin*.



Gambar 10. Kegiatan mendulang intan menggunakan mesin sedot.
Sumber: BanjarbaruKlik.com

Perbedaan antara kegiatan mendulang intan sebelum tahun 2000-an dengan sesudah tahun 2000-an adalah pada alat yang digunakan. Dahulu, para pendulang hanya bermodalkan alat gali sederhana dan linggang sebagai pemilah material (Helmi 2022). Setelah tahun 2000-an, pendulang mulai menggunakan alat sedot untuk mengambil material yang ada di dasar tanah (Anonim 2019). Terjadinya pengurangan debit tanah dan pasir di sekitar area pertambangan telah mengubah lanskap kawasan tersebut.



Gambar 11. Lokasi pendulangan intan di Cempaka tahun 2009. Sumber: Google Earth Pro.



Gambar 12. Lokasi pendulangan intan di Cempaka tahun 2012. Sumber: Google Earth Pro.

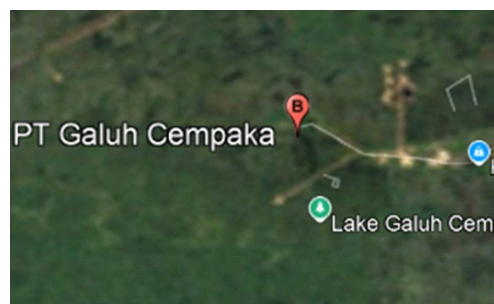
Kegiatan mendulang intan secara tradisional di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sudah dilakukan sejak lama. Akibat paling mencolok dari kegiatan pendulangan itu ialah terbentuknya lubang-lubang galian yang lambat laun menjadi danau, seperti pada gambar 11 dan 12. Lubang galian diperkirakan mencapai 2,98 hektare (Arief 2023). Menurut pengamatan pada peta tahun 2009, sudah banyak lubang-lubang galian akibat akumulasi dari kegiatan pendulangan dari periode kolonial (Google Earth Pro 2009). Jika dibandingkan dengan peta tahun 2012, memang tidak terlihat perluasan area penambangan tetapi kedalaman lubang yang disedot mencapai 10-50 meter.

Akibatnya, ketika musim hujan tiba, lubang-lubang galian itu terisi air dan menjadi danau bekas tambang (Google Earth Pro 2012a). Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran pentingnya menjaga lingkungan, maka kemungkinan terdekat yang akan terjadi ialah bencana ekologis di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

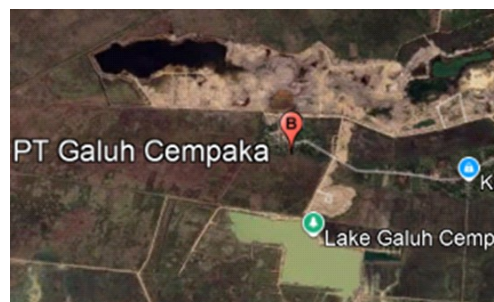
Selain pertambangan intan tradisional yang dikelola oleh rakyat di Kecamatan Cempaka, ada juga pertambangan modern yang dikelola oleh PT Galuh Cempaka. Perusahaan tersebut sudah beroperasi dari awal tahun 2000-an dengan luas wilayah kelola sebesar 2.900 hektare. Menurut laporan dari Pemerintah Kota Banjarbaru, pada 2007, PT Galuh Cempaka menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,5 miliar. Tetapi, media memperkirakan bahwa pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar lagi, yaitu sekitar Rp19,5 miliar (Azkia 2018:63).

Satu tahun kemudian, yakni pada 2008, PT Galuh Cempaka mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa pencabutan izin. Alasan pencabutan itu karena kegiatan pertambangan PT Galuh Cempaka terbukti mencemari air di sekitar pertambangan dengan ditemukannya kandungan merkuri yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan intan (Munawar 2013:35). Bukan hanya itu, PT Galuh Cempaka meninggalkan tiga buah danau bekas galian tambang. Air yang terdapat pada lubang bekas galian tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar karena memiliki kandungan asam yang tinggi sehingga sulit digunakan untuk

memasak dan keperluan rumah tangga lainnya (Barokah 2022:4).



Gambar 13. Lokasi penambangan PT Galuh Cempaka tahun 2003. Sumber: Google Earth Pro.



Gambar 14. Lokasi penambangan PT Galuh Cempaka tahun 2011. Sumber: Google Earth Pro.

Perbandingan antara lokasi tambang tahun 2003 dengan tahun 2011, seperti ditunjukkan pada gambar 13 dan 14, memperlihatkan kondisi yang kontras. Pada awal penambangan, di lokasi penambangan PT Galuh Cempaka tahun 2003 masih banyak lahan hijau (Google Earth Pro 2003). Setelah ditambang kurang lebih selama delapan tahun, wilayah tersebut sudah berubah menjadi lubang-lubang galian, bahkan menjadi danau yang disebut Danau Galuh Cempaka (Google Earth Pro 2011a).

PT Galuh Cempaka menambang dengan sistem *dumping*, yakni dengan cara mengupas tanah paling atas, kemudian baru melakukan penggalian. Hasil dari penggalian ini meninggalkan

lubang-lubang galian yang ketika musim hujan terisi atau terendam air sehingga membentuk danau-danau. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kegiatan penambangan dapat memengaruhi sifat fisika, kimia, dan biologi tanah dan air di lokasi penambangan. Oleh karena itu, wilayah bekas tambang ini sangat sulit dimanfaatkan kembali karena tanah dan air sudah mengalami pencemaran sehingga otomatis menjadi wilayah yang tidak produktif (As'ad 2005:9).

Selain itu, kondisi sungai-sungai di Desa Bangkal, Kecamatan Cempaka pada 2008 sangat mengkhawatirkan. Kadar lumpur pada air sungai sangat tinggi sehingga menyebabkan pendangkalan sungai, bahkan muncul daratan-daratan sedimen. Lumpur tersebut berasal dari kegiatan penambangan di sekitar wilayah tersebut. Proses sedimentasi juga memicu makin sedikitnya tampungan air di Kota Banjarbaru (Hidayat 2009:87). Menurut hasil wawancara dengan Ridho pada 20 November 2023 di Yogyakarta, kegiatan penambangan sangat meresahkan masyarakat setempat karena merusak ekosistem sungai. Dahulu, air sungai masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga, tetapi kondisi tersebut berubah setelah banyaknya pertambangan-pertambangan baru yang menyebabkan tercemarnya air sungai oleh limbah pertambangan.

Proses perubahan lanskap yang terjadi di Kota Banjarbaru dipengaruhi oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya perubahan status kota administratif menjadi kotamadya yang setingkat

kabupaten Pemerintah Kota Banjarbaru juga membuat kebijakan untuk memajukan wilayah, yakni dengan cara memperbanyak pembangunan permukiman baru dan membuka investasi. Kebijakan tersebut membuat pemerintah setempat cenderung memprioritaskan pemanfaatan lahan kering untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri. Bukan hanya pemerintah saja yang menjadi aktor perubahan, melainkan juga masyarakat dan perusahaan pertambangan yang ikut andil dalam perubahan lanskap Kota Banjarbaru. Kegiatan pertambangan intan di Kecamatan Cempaka yang dikelola oleh masyarakat dan perusahaan, telah mengubah mengubah lahan hijau menjadi galian-galian tambang dan meninggalkan lubang yang menjadi danau. Namun, danau-danau tersebut menjadi lahan tidak produktif karena tanah serta airnya tercemar oleh bahan berkadar kimia sangat tinggi. Kegiatan pertambangan juga memicu sedimentasi dan pencemaran beberapa sungai di wilayah dekat tambang sehingga bisa dipastikan kegiatan pertambangan intan ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.

2. Kondisi Lanskap Kota Banjarbaru Sebelum Tahun 1999, dalam Kurun Waktu 1999-2011, dan Sesudah Tahun 2011: Sebuah Refleksi

Setelah menguraikan perubahan lanskap Kota Banjarbaru beserta dampaknya, penulis ingin membahas mengenai upaya alih fungsi lahan yang terjadi pada 1950-an, ketika Kalimantan masih menjadi satu provinsi dan memiliki ibu kota di Banjarmasin.

Posisi Gubernur Kalimantan saat itu dijabat oleh Dokter Murjani. Karena kondisi Banjarmasin yang sudah padat penduduk dan sering banjir, Dokter Murjani pada 1951 memiliki gagasan untuk memindahkan ibu kota Provinsi Kalimantan. Di tahun 1953, gagasan tersebut ditindaklanjuti Gubernur Kalimantan dengan rencana memindahkan ibu kota Provinsi Kalimantan ke Gunung Apam yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Saat itu, kawasan Gunung Apam masih berupa lahan kosong dan sebagian wilayahnya masih hutan.

Dokter Murjani membutuhkan orang dengan keahlian untuk menata kota. Pada 1950-an masih sedikit orang Indonesia yang mempunyai keahlian tata kota. Oleh karena itu, dia meminta tolong kepada orang Belanda yang bernama Van der Pijl. Setelah diberi mandat, Van der Pijl mulai merancang tata kota di wilayah Gunung Apam dan Dokter Murjani mulai memberinya nama Banjarbaru, yang berarti kota baru di wilayah Banjar. Sejak saat itu, penyebutan Gunung Apam berubah menjadi Banjarbaru (Aufa dan Anhar 2012:143). Tetapi rencana pemindahan ibu kota provinsi tidak terealisasi karena terkendala beberapa faktor, termasuk faktor keuangan.

Eksplorasi dan eksploitasi terhadap hutan yang dilakukan secara berabad-abad menjadikan beberapa wilayah mengalami kegundulan hutan. Fenomena tersebut menjadi pemantik bagi pemerintah Kota Banjarbaru untuk menjaga hutan. Mereka melakukan upaya penanaman sekitar 250 pohon pada 1989. Kegiatan ini mereka

usahakan untuk memperbaiki ekosistem hutan yang sudah rusak, dengan harapan mampu mengembalikannya ekosistem hutan sehingga mampu dikelola sebagai kawasan wisata (Anonim 1989a:3).

Pemerintah Kalimantan Selatan mulai serius menata hutan dengan membagi tata guna hutan menjadi lima bagian, yaitu hutan suaka alam dan hutan wisata sejumlah 139,315 hektare, hutan lindung 432,736 hektare, hutan produksi terbatas 132,975 hektare, hutan-hutan produksi tetap 1.325.024 hektare, dan hutan konservasi 284.670 hektare (Anonim 1989b:8). Penataan ini difungsikan sebagai upaya untuk menjaga hutan alami agar tetap lestari.

Jika melihat perubahan lanskap suatu daerah, kurang tepat rasanya kalau belum meninjau pertumbuhan penduduk di daerah itu. Jumlah penduduk Kabupaten Banjar dan Tanah Laut pada 1961 berjumlah 310.562 jiwa. Selang 7 tahun kemudian, yakni pada 1968, meningkat menjadi 363.147 jiwa. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi peningkatan sekitar 17 persen. Perlu dilihat bahwa di tahun 1965, Kabupaten Tanah Laut berpisah dengan Kabupaten Banjar dan berdiri menjadi kabupaten sendiri. Upaya ini dilakukan untuk memajukan wilayah yang kurang berkembang (Brotomoeljono et al. 1993:9).

Kecamatan Landasan Ulin	
Tahun	Jumlah
1994	30.934
1995	33.255
1996	33.194
1997	33.488

Kecamatan Banjarbaru	
Tahun	Jumlah
1994	42.721
1995	46.800
1996	48.563
1997	48.905

Kecamatan Cempaka	
Tahun	Jumlah
1994	17.987
1995	20.716
1996	19.136
1997	19.707

Total Keseluruhan	
Tahun	Jumlah
1994	91.642
1995	100.871
1996	100.893
1997	102.100

Tabel. 5. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 1994-1997. Sumber: diolah dari data BPS Kota Administratif Banjarbaru.

Tabel 5 menyajikan data mengenai jumlah penduduk di Kota Banjarbaru tahun 1990-an. Berdasarkan data di atas, kenaikan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terbilang stabil, kecuali antara tahun 1994 menuju 1995 yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni sekitar 9.000-an jiwa. Berikutnya, di tahun 1995 sampai 1997 tidak ada kenaikan yang mencapai angka tersebut (BPS Kabupaten Banjar 1995). Di Kecamatan Landasan Ulin, jumlah penduduk mengalami kenaikan antara tahun 1994 dan 1995, yakni meningkat sekitar 3.000-an jiwa. Pada tahun-tahun berikutnya terbilang stabil, meski ada sedikit penurunan pada 1996 (BPS Kabupaten Banjar 1996). Kecamatan Banjarbaru juga mengalami kenaikan jumlah penduduk antara tahun 1994 dan 1995, yakni meningkat sekitar 4.000-an jiwa. Berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Landasan Ulin, di

Kecamatan Banjarbaru mengalami kenaikan penduduk setiap tahunnya. Pada 1996 naik sekitar 2.000-an jiwa, sedangkan tahun 1997 naik sekitar 200-an jiwa (BPS Kabupaten Banjar 1997). Terakhir, Kecamatan Cempaka mengalami pola kenaikan seperti di Kecamatan Landasan Ulin. Antara tahun 1994 dan 1995 mengalami kenaikan sekitar 3.000-an jiwa. Penurunan jumlah penduduk terjadi pada 1996, kemudian naik lagi pada 1997 (BPS Kabupaten Banjar 1998).

Menurut data yang disampaikan oleh Departemen Transmigrasi dan Perambahan Hutan Kabupaten Banjar, peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Cempaka tahun 1994-1995, terpengaruh oleh program transmigrasi yang diselenggarakan pada periode kepemimpinan Presiden Soeharto. Rincian jumlah jiwa dan daerah asal yang ditempatkan di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yakni: (1) Jawa Barat 179 jiwa, (2) Jawa Tengah 194 jiwa, dan (3) Jawa Timur 179 jiwa. Total keseluruhan yang ditransmigrasi ke Kecamatan Cempaka, yakni sejumlah 552 jiwa (BPS Kabupaten Banjar 1998).

Berikut ini adalah tabel ketersediaan lahan kering tahun 1995 dan 1997 di Kota Banjarbaru.

Jenis Penggunaan Lahan	1995	1997
Pekarangan/lahan untuk bangunan	5.343	7.291
Tegal/kebun	3.788	3.550
Hutan Rakyat	900	1.306
Jumlah	10.031	12.147

Tabel 6. Luas tanah kering menurut jenis penggunaannya di Kota Administratif Banjarbaru (dalam hektare) tahun 1995 dan 1997. Sumber: diolah dari data BPS Kota Administratif Banjarbaru.

Menurut data yang dipaparkan BPS di atas, jumlah penggunaan lahan kering sebagai lahan bangunan dan pekarangannya pada 1995 berjumlah 5.343 hektare. Setelah mengikuti pertumbuhan penduduk selama dua tahun, kawasan terbangun beserta pekarangannya pada 1997 meningkat menjadi 7.291 hektare.

Selanjutnya, lahan tegal atau kebun di Kota Banjarbaru pada 1995 berjumlah 3.788 hektare dan mengalami penurunan pada 1997 menjadi 3.550 hektare. Penurunan jumlah tegal atau kebun diperkirakan dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kawasan terbangun sehingga terjadi peralihan sebagian fungsi dari lahan produktif menjadi tidak produktif. Sektor kehutanan yang dikelola oleh rakyat juga mengalami peningkatan, yakni pada 1995 berjumlah 900 hektare, kemudian naik menjadi 1.306 hektare pada 1997. Peningkatan ini merupakan bagian dari dampak kenaikan jumlah penduduk serta makin mengecilnya lahan produktif. Oleh karena itu, di tahun 1997 masyarakat Kota Banjarbaru memanfaatkan hutan rakyat sebagai lahan produksi guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Kawasan hutan Kalimantan Selatan pada 1985 sampai 1997 mengalami deforestasi. Pada 1985, luas area hutan mencapai 1.795.900 hektare. Jumlah ini menurun pada 1991 menjadi 1.749.360 hektare dan puncaknya pada 1997 hanya menyisakan 999.182 hektare. Penurunan secara drastis ini tidak terjadi akibat bencana alam, melainkan karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap hutan. Mereka

mengubah fungsi lahan dari hutan menjadi kawasan terbangun atau lahan pertanian (Nawir dan Rumboko 2007:25).

Proses perubahan lanskap Kota Banjarbaru sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, pada 2005, di Kota Banjarbaru masih banyak lahan kosong, seperti semak belukar atau RTH. Kondisi Kota Banjarbaru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Laut yang masih banyak lahan kosong ini berbeda dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Martapura. Sesuai dengan data yang sudah dipaparkan pada bagian proses perubahan lanskap dan dampaknya, tahun 2005 menjadi masa transisi perubahan lanskap karena sebelum tahun 2005 baru ditetapkan perda mengenai tata ruang kota. Kebijakan tersebut telah memiliki dampak terhadap lanskap, tetapi perlu digarisbawahi bahwa sesudah tahun 2005, pemerintah Kalimantan Selatan membuat kebijakan untuk memindahkan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, kondisi lanskap setelah tahun 2005 mengalami perubahan drastis sebab pembangunan perkantoran serta kawasan terbangun sudah dimulai. Sesuai dengan data yang didapat dari BPS, tahun 2010 menjadi puncak dari alih fungsi lahan, yakni dari lahan kosong, hutan, dan kawasan pertanian menjadi industri dan perumahan.

Pada 2010, di Kecamatan Banjarbaru Utara tidak terdapat industri skala besar, melainkan berdiri 6 perusahaan skala sedang, 47 skala kecil, dan 157 skala perumahan (BPS Kota

Banjarbaru 2012a). Dalam rencana penataan kota, Kecamatan Banjarbaru Utara memang tidak diprioritaskan sebagai wilayah industri. Berikutnya, masih pada tahun 2010, di Kecamatan Banjarbaru Selatan tidak didirikan industri skala besar dan sedang, yang ada hanya industri skala kecil sejumlah 36 dan industri skala rumah tangga sebanyak 58 (BPS Kota Banjarbaru 2011a). Kecamatan Banjarbaru Selatan pun tidak ditujukan untuk kawasan industri. Selanjutnya, menurut data BPS tahun 2010, Kecamatan Cempaka memiliki paling sedikit industri, yakni 14 skala kecil dan 94 skala rumah tangga (BPS Kota Banjarbaru 2012b). Sedikitnya industri di wilayah ini karena lahannya banyak difungsikan sebagai pertambangan sehingga kurang produktif untuk membangun industri. Menurut data BPS tahun 2010, Kecamatan Landasan Ulin memiliki 1 industri skala besar, 14 skala sedang, 83 skala kecil, dan 168 skala rumah tangga. Jumlah ini memang selaras dengan perencanaan tata ruang Kota Banjarbaru, yakni menempatkan Kecamatan Landasan Ulin sebagai prioritas industri (BPS Kota Banjarbaru 2012c). Keberadaan kawasan industri ini menyebabkan pertumbuhan penduduk dan berkurang-nya RTH di Kota Banjarbaru.

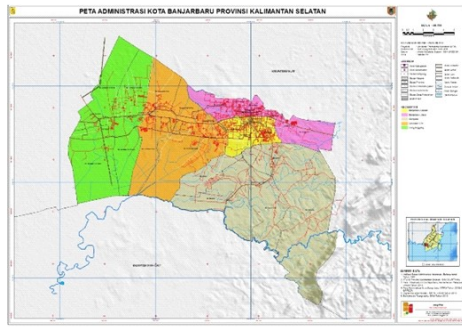
Menurut Jumriani, perekonomian di Kota Banjarbaru dari tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu mengalami pertumbuhan di atas 5 persen, namun mengalami penurunan pada 2020 karena terjadi pandemi Covid-19 (2023:68). Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, yakni makin banyaknya industri, berkembangnya

usaha pertokoan masyarakat, dan rencana pemindahan ibu kota provinsi.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru tahun 2016, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berjumlah 211. Usaha tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni 141 unit usaha skala kecil, 60 unit usaha skala menengah, dan 10 unit usaha skala besar. Jumlah UKM ini merupakan dampak dari rencana perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (Marliani 2018:53).

Perbandingan angka pertumbuhan ekonomi antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mengalami pergeseran di tahun 2010 dan 2019. Pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin tahun 2010, yaitu 6,47 persen, sedangkan Kota Banjarbaru 5,85 persen. Berbeda dengan tahun 2019, pertumbuhan di Kota Banjarmasin 6,11 persen dan pertumbuhan di Kota Banjarbaru 6,93 persen. Terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin mengalami penurunan, sedangkan di Kota Banjarbaru malah mengalami kenaikan (Zakkie dan Effendi 2022:471). Industri yang ada di Kota Banjarbaru diduga sebagai faktor pendorong kenaikan ekonomi (Suryansyah 2018:340).

Lokasi Kota Banjarbaru memang strategis karena berdekatan dengan Kota Banjarmasin, Kota Martapura, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Maka dari itu, wilayah ini kerap dijadikan incaran untuk mencari pekerjaan serta tempat menetap (Annisa, Praselia, dan Riduan 2020:91).



Gambar 15. Peta administratif Kota Banjarbaru. Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Selatan.

Tahun	Jumlah Penduduk
2017	248.423
2018	255.597
2019	262.719
2020	253.442
2021	258.753
2022	253.753

Tabel 7. Data penduduk Kota Banjarbaru tahun 2017-2022. Sumber: Diolah dari data BPS Kota Banjarbaru.

Kenaikan ekonomi dan lapangan pekerjaan juga berimbas pada kenaikan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru. Jika membandingkan data penduduk sebelum tahun 1999 dengan tahun 2019, terlihat bahwa kenaikan jumlah penduduk sudah melewati 50 persen. Kenaikan ini disebabkan perpindahan masyarakat untuk mencari kerja ke wilayah Kota Banjarbaru karena makin banyak lapangan pekerjaan dan dibukanya wilayah perkantoran baru (Umar dan Busyairi 2023:14).

Menurut Sofyan A. P. et al. (2023:271), jumlah penduduk Kota Banjarbaru diprediksi mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya karena pada 2022 Kota Banjarbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, dengan

makin berkembangnya Kota Banjarbaru, Kawasan RTH makin terancam karena pembukaan lahan untuk perkantoran baru, permukiman baru, dan kawasan industri baru (Forasidah 2021:131).

Kota Banjarbaru sudah memiliki daya tarik sejak tahun 1950-an karena dianggap sebagai wilayah yang lebih ideal daripada Kota Banjarmasin. Melihat penduduk di Indonesia yang belum merata, Presiden Soeharto pada 1990-an membuat kebijakan transmigrasi dari wilayah padat penduduk ke wilayah yang masih sedikit penduduknya. Kota Banjarbaru menjadi wilayah penempatan program itu sehingga mengalami kenaikan jumlah penduduk di tahun 1990-an. Daya tarik Kota Banjarbaru tidak hanya berhenti pada 1990-an. Menurut data kenaikan ekonomi tahun 2016-2019, Kota Banjarbaru mengalami kenaikan ekonomi di atas 5 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin mengalami pergeseran ke Kota Banjarbaru karena isu perpindahan ibu kota provinsi masih terus digaungkan. Rencana tersebut baru direalisasikan tahun 2022 saat pusat dari Kalimantan Selatan sudah benar-benar berpindah.

D. SIMPULAN

Seperti yang disampaikan oleh Hughes bahwa manusia menjadi agen perubahan lingkungan, sedangkan McNeill dan Nawiyanto memandang bahwa institusi negara menjadi eksekutor melalui kebijakan-kebijakan untuk melestarikan atau mengeksploitasi lingkungan. Perubahan bentuk Kota Banjarbaru dari kota

administratif menjadi kotamadya di tahun 1999 berakibat pada peningkatan jumlah penduduk dan perubahan RTH menjadi kawasan terbangun. Selain itu, ketika manusia merasa lingkungan tempat tinggalnya sudah tidak bersahabat lagi, mereka akan berusaha mencari wilayah baru yang dianggap lebih baik dari lingkungan sebelumnya sehingga muncul wacana untuk memindahkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Tetapi, untuk mewujudkan itu semua diperlukan kebijakan-kebijakan guna merealisasikan keinginan tersebut. Oleh karena itu, wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006. Akibatnya, terjadi percepatan kenaikan jumlah penduduk dan percepatan perubahan RTH pada 2011. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempati posisi sentral dalam mendorong terjadinya perubahan lingkungan dan lanskap di Kota Banjarbaru.

Bukti dari perubahan RTH menjadi kawasan terbangun terjadi di Kecamatan Cempaka yang difungsikan sebagai gedung-gedung pemerintahan baru. Wacana pemindahan ibu kota provinsi juga direspon oleh para investor di bidang perumahan, contohnya PT Megah Jaya Prestasi yang bekerja sama dengan pemerintah. Perusahaan mulai aktif membangun beberapa perumahan di Kota Banjarbaru tahun 2000-an. Perusahaan peternakan PT Japfa Comfeed Indonesia membuka cabang di Kota

Banjarbaru untuk mengembangkan bisnisnya di sektor peternakan. Selain itu, masyarakat Kota Banjarbaru melakukan kegiatan pertambangan secara tradisional dengan menggunakan alat seadanya, yang kemudian disusul dengan mulai beroperasinya PT Galuh Cempaka di tahun 2000-an yang menerapkan cara modern. Beberapa kegiatan penambangan tersebut makin memperparah perubahan lanskap di Kota Banjarbaru. Proses perubahan lanskap memiliki dampak yang paling terasa, yakni meningkatnya jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 2008-2011 serta makin sedikitnya RTH pada tahun 2011 karena meningkatnya kawasan terbangun dan pertambangan. Hal ini menegaskan bahwa perubahan lanskap di Kota Banjarbaru sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan masyarakat setempat yang mendiaminya.

Artikel ini juga berusaha mengisi kekosongan dalam historiografi lingkungan di Indonesia, dengan menghadirkan fenomena perubahan lanskap sebagai peristiwa sejarah lingkungan. Semoga artikel ini mampu menjadi pemantik tulisan-tulisan sejarah lingkungan selanjutnya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Dr. Abdul Wahid, M. Hum., M. Phil. dan Dr. Ahmad Athoillah, M.A. serta teman-teman sejawat atas diskusi dan saran-saran yang telah diberikan untuk perbaikan tulisan ini.

DAFTAR SUMBER

- Abdurrahman, M. Najeri Al Syahrin, Dhena Aldhalia, dan M. Ramadhan Saputra. 2022. "Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Banjar: Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut." Prosiding, Seminar Nasioal Lahan Basah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Adhisumarta dan Sriyadi. 2003. "Kota Banjarbaru." *Kompas*, September 11.
- Amberi, Wajidi. 2012. "Banjarbaru Menuju Ibu Kota Provinsi." *Bubuhan Banjar*. Diunduh 10 Agustus, 2024 (<https://bubuhanbanjar.wordpress.com/2012/05/07/banjarbaru-menuju-ibukota-provinsi-3/>).
- Annisa, Nova, Hafiih Prasetia, dan Rony Riduan. 2020. "Identifikasi Luas Area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banjarbaru Berbasis Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 7(3):90-100.
- Anonim. 1989a. "Jajaran Witel IX Kalimantan Kampanye Sadar Wisata." *Harian Neraca*, Mei, 20.
- Anonim. 1989b. "Mungkinkah Target Repelita V Tercapai." *Harian Neraca*, Desember 13.
- Anonim. 2010. "2011 Pemprov ke Banjarbaru." *Antara Kalsel*. Diunduh 10 Agustus, 2024 (<https://kalsel.antaranews.com/berita/395/2011-pemprov-ke-banjarbaru>).
- Anonim. 2019. "Pendulangan Intan Cempaka Kembali Longsor, Satu Pendulang Meninggal Dunia." *banjarbaruklik*. Diunduh 10 Oktober, 2024 (<https://banjarbaruklik.com/pendulangan-intan-cempaka-kembali/>).
- Arianti, Rina, Mijani Rahman, dan Suhaili Asmawi. 2019. "Analisis Daya Tampung Beban Pencemar Kegiatan Keramba Jaring Apung di Danau Bekas Galian Tambang Intan PT. Galuh Cempaka di Desa Palam." *Aquatic* 1(1):48-65.
- Arief. 2023. "Resmi, Tambang Intan Rakyat Cempaka Masuk RTRW Banjarbaru." *Radar Banjarmasin*. Diunduh 10 Oktober, 2024 (<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973156876/resmi-tambang-intan-rakyat-cempaka-masuk-rtrw-banjarbaru>).
- As'ad. 2005. "Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan)." Tesis, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aufa, Naimatul, dan Pakhri Anhar. 2012. "Studi Tata Ruang Kota Rencana Van Der Pijl Kasus: Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan." *TATALOKA* 14(2):142-55.
- Aurumbita, Yuke Nori. 2015. "Pemindahan Pusat Pemerintahan

- Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru.” Tesis, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Azkia, Laila. 2018. “Analisis Sosiologi Ekonomi pada Tambang Rakyat (Kajian terhadap Kegiatan Ekonomi dalam Tambang Rakyat Intan di Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan).” *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 3(1):59-69.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 1995. “Kotip Banjarbaru dalam Angka 1994.”
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 1996. “Kotip Banjarbaru dalam Angka 1995.”
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 1997. “Kotip Banjarbaru dalam Angka 1996.”
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 1998. “Kotip Banjarbaru dalam Angka 1997.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2002. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2001.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2003. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2002.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2004. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2003.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2005. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2004.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2006. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2005.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2007. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2006.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2008. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2007.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2009. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2008.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2010. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2009.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2011a. “Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Angka 2010.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2011b. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2010.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2012a. “Kecamatan Banjarbaru Utara dalam Angka 2011.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2012b. “Kecamatan Cempaka dalam Angka 2011.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2012c. “Kecamatan Landasan Ulin dalam Angka 2011.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2012d. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2011.”
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. 2024. “Kota Banjarbaru dalam Angka 2023.”

- Bakosurtanal. 1991. "Martapura." *Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 5(2):124-38.
- Bogor: Bakosurtanal.
- Banjarbaru. 2001. *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010*.
- Banjarbaru. 2007. *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru*.
- Barokah, Syarifah Anisa. 2022. "Analisis Permasalahan Lingkungan Akibat Aktivitas Penambangan Intan Kecamatan Cempaka Kalimantan Selatan." *Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIM ULM*.
- Brotomoeljono, Yustan Aziddin, H. Ramli Nawawi, dan A. Gazali Usman. 1993. *Sejarah Pengaruh PELITA terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Febriana, Nevi Viliyanti, Endah Rahayu Lestari, dan Anggarini. 2015. "Analisis Pengukuran Waktu Kerja dengan Metode Pengukuran Kerja secara Tidak Langsung pada Bagian Pengemasan di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk." *Jurnal Industri* 4(1):66-73.
- Forasidah. 2021. "Optimalisasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Kota Banjarbaru." *Jurnal PubBis: Jurnal Penelitian dan Pemikiran*
- Google Earth Pro. 2003. "Lokasi Penambangan PT. Galuh Cempaka tahun 2003."
- Google Earth Pro. 2005a. "Perumahan Pondok Kelapa dan Griya Megah tahun 2005."
- Google Earth Pro. 2005b. "Peta Kota Banjarbaru tahun 2005."
- Google Earth Pro. 2005c. "PT. Japfa Comfeed Indonesia Cabang Banjarbaru tahun 2005."
- Google Earth Pro. 2009. "Lokasi Pendulangan Intan Cempaka tahun 2009."
- Google Earth Pro. 2011a. "Lokasi Penambangan PT. Galuh Cempaka tahun 2011."
- Google Earth Pro. 2011b. "Peta Kota Banjarbaru tahun 2011."
- Google Earth Pro. 2011c. "PT. Japfa Comfeed Indonesia Cabang Banjarbaru tahun 2011."
- Google Earth Pro. 2012a. "Lokasi Pendulangan Intan Cempaka tahun 2012."
- Google Earth Pro. 2012b. "Perumahan Pondok Kelapa dan Griya Megah tahun 2012."
- Google Earth Pro. 2012c. "Peta Kota Banjarbaru tahun 2012."
- Helmi, Muhammad. 2022. "Masa Jaya Pendulangan Cempaka, Pernah Temukan Intan Bernilai 10 Triliun." *Radar Banjarmasin*.

- Diunduh 10 Oktober, 2024 (<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/tahulah-pian/1973149692/masa-jaya-pendulangan-cempaka-pernah-temukan-intan-bernilai-10-triliun>).
- Hidayat, Herman. 2016. *Forest Resources Management in Indonesia (1968-2004): A Political Ecology Approach*. Singapore: Springer Singapore.
- Hidayat, Taufik. 2009. "Dampak Perubahan Lingkungan Sungai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru." Tesis, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hughes, J. Donald. 2009. *An Environmental History of the World: Humankind's Changing Role in the Community of Life*. 2nd ed. London and New York: Routledge.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru*.
- Jumriani. 2023. *Kajian-Kajian Lokal Kalimantan Selatan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Linus. 2019. "BNPB Pilih Kalimantan untuk Ibu Kota Indonesia." *barakata.id*. Diunduh pada 10 Agustus, 2024 (<https://barakata.id/bnpb-pilih-kalimantan-untuk-ibu-kota-indonesia/>).
- Mahyudin, Rizki Puteri, Adrias Mashruri, Fathurrazie Shadiq, dan Yusuf Azis. 2011. "Kajian Perencanaan Pembentukan TPA Regional Rencana Daerah Layanan Kota Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura." *EnviroScientea* 7:113-23.
- Marliani, Gusti. 2018. "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Banjarbaru (Studi Usaha Percetakan)." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9(1):47.
- McNeill, John Robert. 2003. "Observations on the Nature and Culture of Environmental History." *History and Theory* 42(4):5-43.
- Munawar, Akhmad. 2013. "Penegakan Hukum Lingkungan Hutan di Kalimantan Selatan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 5(10):28-45.
- Mustofa, Adip. 2005. "Kajian Prospek Batu Permata Banjarbaru dalam Prespektif Geologi Bahan Galian." *Info Teknik* 6,(2):71-78.
- Nawir, Ani Adiwinata, Murniati, dan Lukas Rumboko. 2007. "History and State of Deforestation and Land Degradation. Hlm. 11-32 dalam *Forest Rehabilitation in Indonesia: Where to after More than Three Decades*. Disunting oleh Ani Adiwinata Nawir, Murniati, dan Lukas Ramboko. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

- Nawiyanto, S. 2012. *Pengantar Sejarah Lingkungan*. Jember: UPT Penerbitan Unej.
- Pujianti, Sri. 2022a. "Menyoal Konstitusionalitas Perpindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Diunduh 22 Januari 2024 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18222&menu=2#>).
- _____. 2022b. "Pemerintah Sebut Banjarbaru Dirancang Sebagai Kota Penyangga Pembangunan IKN." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Diunduh 22 Januari 2024 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18360>).
- Setyati, Rina. 2012. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru." Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setyati, Rina, dan Warsito Utomo. 2015. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 19(1):59-72.
- Sofyan A. P., Andi Baso, Feri Fadlin, Radik Khairil Insanu, Suriani Lili, dan Fuad Agung Maulana S. 2023. "Analisis Tingkat Kerawanan Kekritisian Lingkungan Menggunakan Metode Environmental Criticality Index (ECI) di Kota Banjarbaru." *Jurnal Reka Lingkungan* 11(3):270-83.
- Suryansyah, M. 2018. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Kota Banjarbaru." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 1(2):339-48.
- Umar, Said, dan Muhammad Busyairi. 2023. "Analisis Kebutuhan Air Bersih Kota Banjarbaru dengan Status Baru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL* 7(2):11-9.
- Wawancara. Ridho Bagus Pertama. Yogyakarta, 20 November 2023.
- Zakkie, Muhammad, dan Muhammad Effendi. 2022. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Indeks Pembangunan Manusia antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru Tahun 2010-2019." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 5(2):470.

